**Optimalisasi Kerjasama Hexa-Helix**

**Guna Mendukung Pengamanan Pemilu**

Bellen Anggara Pratama

[Staf Dan Pimpinan Menengah Polri, Sespim Lemdiklat Polri]

[Jalan Maribaya Nomor 63, Kec. Lembang, Kab. Bandung Barat, 40391]

[bellenanggarapratama@gmail.com]

Abstract

This paper is motivated by the urgency of maintaining political stability and security leading up to the 2024 elections, considering that several countries have experienced post-election conflicts. Although Indonesia's democracy tends to be better, the challenges of securing the 2024 elections are increasing. This research aims to optimize hexa-helix collaboration, which involves the government, business sector, academics, communities/NGOs, mass media, and aggregators, namely election organizers and participants, to enhance synergy in securing the 2024 elections. The research method used is descriptive-analytical, with data collected through observation, interviews, literature review, and SWOT analysis. The results indicate that the interaction among hexa-helix elements is not yet optimal, especially with academics, the business sector, mass media, and election participants. Ketapang Sub-regional Police have a central role in coordinating hexa-helix elements, although there are operational challenges and a need to enhance their role as regulators, facilitators, and catalysts.

Keywords: ***Collaboration; Hexa-helix; Ketapang Police; 2024 elections.***

Abstrak

Tulisan ini dilatarbelakangi adanya urgensi menjaga stabilitas politik dan keamanan menjelang Pemilu 2024, mengingat sejumlah negara mengalami konflik pasca-pemilu. Meskipun demokrasi Indonesia cenderung lebih baik, tantangan pengamanan Pemilu semakin meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan kerjasama hexa-helix, yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas/NGO, media massa, serta agregator yaitu penyelenggara dan peserta Pemilu yang diharapkan dapat meningkatkan sinergi dalam pengamanan Pemilu 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-analisis dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi literatur, dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi antar unsur hexa-helix belum optimal, terutama dengan akademisi, dunia usaha, media massa, dan peserta Pemilu. Polres Ketapang memiliki peran sentral dalam mengkolaborasikan unsur hexa-helix, meskipun masih ada kendala operasional dan perlu meningkatkan peran sebagai regulator, fasilitator dan dinamisator.

Kata Kunci: ***Kolaborasi; Hexa-helix; Polres Ketapang; Pemilu 2024.***

# Pendahuluan:

## Latar Belakang Masalah

Permintaan Presiden Joko Widodo pada Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Se-Indonesia di Sentul International Convention Centre (SICC) awal tahun 2023 kepada seluruh jajarannya untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan menjelang pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 perlu mendapatkan perhatian serius dari segenap aparatur negara. Permintaan tersebut bukan tanpa alasan mengingat sejumlah negara terjerumus ke dalam konflik berkepanjangan pasca pemilu. Sebagai contoh pada tahun 2018 negara Venezuela, Pakistan, Kongo dan Zimbabwe berakhir dengan konflik instabilitas negara-negara tersebut. Pemilu Afghanistan tahun 2014 bahkan lebih buruk lagi karena berujung perang saudara. Situasi kamtibmas yang kondusif juga mendukung transparansi Pemilu karena ketika pemilu berlangsung dalam suasana yang aman, ketertiban, dan bebas dari konflik, masyarakat lebih cenderung percaya pada hasil pemilu dan institusi demokrasi yang terlibat.

Walaupun masih diwarnai berbagai permasalahan, kondisi demokrasi di Indonesia cenderung lebih baik. Namun demikian, kondisi tersebut tidak serta merta menjadikan tugas Polri menjadi lebih mudah. Seiring dengan semakin dekatnya waktu penyelenggaraan Pemilu 2024, eskalasi ancaman dan gangguan Kamtibmas dirasakan kian mengalami peningkatan akibat suhu politik yang semakin memanas. Survei Lembaga Pemilih Indonesia pada bulan Desember 2022 merilis hasil penelitian yang menyebutkan bahwa Tahun 2023 bisa menjadi tahun yang gelap akibat adannya ancaman stabilitas dan resesi ekonomi, ancaman politik identitas, ancaman kekerasan horizontal dan isu papua serta ancaman terorisme dan ideoligi. Belum lagi jika merujuk pada data gangguan Kamtibmas dalam Pemilu 2019 yang diantaranya berupa kejadian kriminal yang berjumlah 55.582 termasuk kejahatan konvensional, transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kontinjensi selama Operasi Mantap Brata. Pada Pemilu 2019 juga ditemukan fenomena meninggalnya 894 KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) ditambah 29 personel Polri gugur, penolakan hasil rekap berujung kerusuhan, polarisasi di tengah masyarakat yang sampai saat ini, politik identitas, berkembangnya hoax dan hatespeech, fenomena buzzer dan money politics pelanggaran netralitas di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Aparatur Desa/Kelurahan khususnya saat Pilkada serentak antara tahun 2021 dan 2022, termasuk di daerah hukum Polres Ketapang.

Mengingat bahwa tantangan terhadap pengamanan Pemilu 2024 semakin tinggi baik eskalasi maupun kompleksitasnya, maka Polri dituntut untuk menjalin kerjasama dengan seluruh pihak baik di internal kepolisian itu sendiri, bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah lainnya, Penyelenggara Pemilu maupun dengan unsur-unsur masyarakat sebagai subjek sekaligus objek dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Salah satu model kerjasama tersebut adalah kerjasama hexa-helix. Model kerjasama Hexa-helix menurut Sturesson, Lindmark, dan Roos (2009) yang terdiri dari 6 enam pemangku kepentingan terdiri dari Pemerintah, Dunia usaha, Akademisi, Organisasi Non Pemerintah, Media Massa dan aggegator yaitu penyelenggara dan peserta pemilu. Keterlibatan lebih banyak stakeholder dalam Pengamanan Pemilu 2024 mengartikan lebih banyak sinergi di antara para pihak termasuk pelaku atau peserta Pemilu. Keberhasilan pengamanan Pemilu 2024 akan menciptakan suasana yang kondusif dan menjamin partisipasi aktif dari seluruh warga negara serta menjamin transparansi dan integritas dari hasil Pemilu.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan diangkat dalam jurnal ini adalah : “Bagaimana optimalisasi kerjasama hexa-helix yang dapat mendukung pengamanan Pemilu 2024?”. Sednangkan pokok-pokok persoalan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana interaksi antar unsur Hexa-helix dalam mendukung Pengamanan Pemilu 2024?
2. Bagaimana peran Polres Ketapang dalam mengkolaborasikan unsur Hexa-helix dalam Pengamanan Pemilu 2024?

## Ruang Lingkup

Ruang lingkup tulisan ini dibatasi pada upaya Kapolres Ketapang sebagai subjek penulisan dalam mengoptimalkan kerjasama Hexa-helix berdasarkan teori kerjasama menurut Pamudji (1985) yang menjelaskan bahwa efektifitas kerjasama dipengaruhi oleh sumber daya yang memadai, peran masing-masing pihak untuk mencapai kepentingan bersama, serta interaksi dalam kerangka organisasi kerjasama. Analisis data diambil dari lokasi penelitian yaitu Polres Ketapang dan sumber-sumber lainnya yang berasal dari tahun 2020 s/d 2022.

## Metode Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penulisan adalah metode deskriptif-analisis, yang diuraikan dengan menganalisa dan menggambarkan kondisi yang ada berdasarkan fakta dan data, serta menggambarkan konsepsi yang mungkin dilakukan berkaitan dengan persoalan yang muncul khususnya terkait kerjasama hexa-helix guna mendukung pengamanan Pemilu 2024.

Pengumpulan Data dilakukan melalui observasi dan wawancara secara langsung melalui saluran telepon kepada Kapolres dan Wakapolres dan video call dan sharing opini terhadap dengan subjek penelitian di Polres Ketapang serta digabungkan dengan studi empiris yang berasal dari pengalaman penulis selama bertugas di Polres Ketapang. Data-data juga diperoleh dari studi literatur terhadap bahan referensi berupa berupa buku, jurnal, karya ilmiah, Lapsat, LAKIP, rekap pelanggaran, buku, internet dan lain sebagainya lainnya sedangkan proses analisis data/dakta dalam penelitian ini meliputi tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan sesuai pendapat B. Milles dan Huberman (2014).

Data dan fakta yang berhasil dikumpulkan dan dikelompokkan sesuai aspeknya kemudian dipilih dan dianalisis menggunakan pendekatan analisis SWOT (Rangkuti, 2013) untuk menentukan dan memformulasikan strategi yang tepat dalam mengoptimalkan kerjasama hexa-helix guna mendukung pengamanan Pemilu 2024.

# Pembahasan

Definisi kolaborasi menurut Camarihna-Matos dan Afsarmanesh (2008) adalah sebuah proses ketika beberapa entitas atau kelompok saling berbagi informasi, sumber daya, dan tanggung jawab atas sebuah program kegiatan yang dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi secara bersama -sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Sedangkan kolaborasi kelembagaan menurut Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012) adalah proses dan struktur dari pengambilan keputusan kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan masyarakat secara konstruktif antar badan badan publik, berbagai level pemerintahan dan atau pada ranah publik, privat dan sipil untuk melaksanakan suatu tujuan publik yang tidak dapat dicapai kecuali oleh forum bersama. Seiring berjalannya waktu, bentuk kolaborasi kelembagaan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sebagaimana digambarkan dalam grafik berikut ini :

Grafik 1. Perkembangan Bentuk Kolaborasi Kelembagaan



*Sumber :* *Satari dan Larasati, 2021.*

Penjelasan terkait perkembangan bentuk kolaborasi kelembagaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kolaborasi Triple Helix menurut Pahlevi (2017) dalam Haris Satria (2022, hal 9) adalah sebuah konsep yang mengacu pada kerjasama antara tiga aktor utama yaitu pemerintah, swasta dan intelektual (tim ahli dari kalangan akademisi dan publik). Konsep ini menekankan pentingnya kolaborasi dan interaksi antara ketiga sektor tersebut dalam upaya meningkatkan inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan.

b. Kolaborasi Quadra Helix dengan penambahan unsur komunitas atau NGO (atau Non-Government Organization) dimana NGO bisa mewakili kepentingan masyarakat, memfasilitasi dialog dan partisipasi publik, melakukan advokasi dan pemberdayaan, kolaborasi penelitian dan proyek atau ikut melakukan pengawasan. (Haris Satria, 2022)

c. Kolaborasi Penta Helix dengan penambahan domain Media massa yang memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan bersama dalam inovasi, pembangunan berkelanjutan, dan pertumbuhan ekonomi melalui pemberian informasi, mendorong partisipasi publik, advokasi kesadaran masyarakat, media pengawasan serta pendukung kolaborasi dan jaringan.

d. Model kerjasama Hexa-helix menurut Sturesson, Lindmark, dan Roos (2009) terdiri dari 6 enam pemangku kepentingan terdiri dari Pemerintah, Dunia usaha, Akademisi, Organisasi Non Pemerintah, Media Massa dan aggegator. Kolaborasi Hexa-helix menambahkan unsur agregator yang menurut Moghadam dan Moballeghi (2007) adalah menyatukan berbagai sumber daya yang berbeda yang sepertinya tidak saling berhubungan di dalam satu platform. Dalam Pemilu 2024, agregator dapat disematkan kepada penyelenggara Pemilu yaitu KPU dan Bawaslu dalam hal ini yaitu KPUD dan Bawaslu Ketapang serta peserta Pemilu termasuk Partai Politik dan masyarakat itu sendiri.

Model Collaborative Governance menurut Ansell dan Gash (2008) terdiri atas beberapa dimensi yaitu :

a. Konteks (*Context*) yang mencakup kondisi dan faktor-faktor yang membentuk latar belakang kolaborasi.

b. Aktor (*Actor*) yang berfokus pada individu, kelompok, atau organisasi yang terlibat dalam kolaborasi.

c. Proses (*Process*) yang menjelaskan bagaimana kolaborasi terjadi termasuk interaksi, komunikasi, dan negosiasi antara aktor-aktor yang terlibat.

d. Hasil (*Outcome*) yang berfokus pada dampak dan hasil yang dihasilkan dan mencakup keputusan yang diambil, kebijakan yang diimplementasikan, dan perubahan nyata dalam masyarakat.

Kolaborasi kelembagaan yang melibatkan kerjasama antara lembaga-lembaga yang berbeda memiliki urgensi yang signifikan dalam berbagai konteks. Banyak isu kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat dan dunia saat ini sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek yang saling terkait. Tidak ada satu lembaga tunggal yang memiliki sumber daya, pengetahuan, atau keahlian yang cukup untuk mengatasi isu-isu ini secara efektif. Kolaborasi kelembagaan memungkinkan penggabungan sumber daya, keahlian, dan perspektif yang berbeda dari lembaga-lembaga yang terlibat, sehingga dapat menangani isu-isu tersebut dengan lebih holistik dan komprehensif. Melalui kolaborasi kelembagaan pula, lembaga-lembaga dapat memanfaatkan dan membagi sumber daya yang terbatas secara lebih efisien. Hal ini dapat mencakup berbagi infrastruktur, teknologi, keahlian, atau anggaran. Dengan melakukan kerjasama, lembaga-lembaga dapat mencapai lebih banyak hasil daripada jika mereka bekerja secara terpisah, karena dapat menghindari duplikasi dan memanfaatkan keunggulan masing-masing. Untuk itulah dalam banyak kesempatan baik Presiden, Wapres maupun Kapolri menekankan mengenai pentingnya kolaborasi kelembagaan.

## Kondisi Umum Situasi Kamtibmas Menjelang Pemilu

Untuk memberi gambaran yang lebih jelas mengenai situasi Kamtibmas di Polres Ketapang, terlebih dahulu perlu dijelaskan mengenai penyelesaian perkara agar dapat memberi gambaran yang lebih komprehensif. Adapun jumlah tindak pidana yang terjadi di Polres Ketapang akan digambarkan pada dalam Tabel berikut:

Tabel 1. Data Kriminalitas dan Penyelesaiannya



*Sumber: Satreskrim Polres Ketapang, 2022.*

Tabel 2. Data Kriminalitas Menonjol



*Sumber: Satreskrim Polres Ketapang, 2022.*

Berdasarkan kedua tabel di atas diketahui bahwa baik tindak kriminal umum maupun kejahatan menonjol yang terjadi di wilayah Kabupaten Ketapang masih menunjuk angka yang cukup tinggi dengan kejahatan Cubis, Curat dan Narkoba sebagai bentuk kriminalitas yang paling banyak terjadi. Data tersebut juga memperlihatkan bahwa tingkat kriminalitas yang terjadi di wilayah Kabupaten Ketapang senantiasa mengalami fluktuasi namun masih cukup tinggi.

Selain dari aspek kriminalitas, Indeks Keamanan menurut Chrysnanda (2023, 136) dapat dilihat dalam bidang politik diantaranya yaitu :

1. Pemilu, Pilkada dapat terselenggara pada setiap tahapannya tanpa konflik fisik maupun pertumpahan darah,
2. Pejabat-pejabat politik mampu menjadi ikon dan mampu mencegah terjadinya konflik politik,
3. Masyarakat mempunyai ketahanan terhadap issue- issue politik,
4. Terbebas dari berbagai kejahatan-kejahatan terorganisir yang mengganggu bidang perpolitikan (white collar crime).

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu instrumen penting dalam kehidupan demokrasi di era otonomi daearah saat ini. Pemilu bukan saja salah satu sarana untuk mewujudkan demokrasi tetapi sekaligus sarana dalam penyelenggaraan kehidupan demokrasi. Pemilu merupakan proses lanjut dari keinginan untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia, dimana dengan Pemilu akan memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk terlibat dalam berbagai proses politik. Namun dalam pelaksanaan Pemilu tersebut, seringkali masih diperumit dengan maraknya ketidakteraturan sosial yang berwujud gangguan Kamtibmas. Adapun prediksi gangguan Kamtibmas dalam pelaksanaan Pemilu serentak 2024 sesuai hasil anev Operasi Mantap Brata dalam pengamanan Pemilu 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3 : Potensi Kerawanan Pemilu 2024



Sumber : Laporan Infosus Satintelkam Polres Ketapang, 2023.

Adapun hasil anev pelaksanaan Pemilu 2019 digambarkan secara umum yaitu masih diwarnai adanya pelanggaran dan laporan kecurangan Pemilu sebagaimana digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4 : Penanganan Laporan Temuan Pada Pemilu 2019



*Sumber : Laporan Anev Pam Pemilu 2019. Polres Ketapang.*

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Polres Ketapang melalui Sentra Gakkumdu menerima 24 laporan pelanggaran maupun tindak pidana Pemilu, namun dari 24 laporan tersebut 17 diantaranya tidak memenuhi syarata pelaporan, 4 kasus bukan tindak pidana pemilu, 2 kasus termasuk perbuatan melawan hukum lainnya dan hanya ada 1 kasus yang diteruskan ke penyidikan.

## Kolaborasi Hexa-helix dalam Pengamanan Pemilu 2024 di Polres Ketapang

Berdasarkan jenis interaksinya, gambaran umum terkait kerjasama hexa-helix dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5: Data Interaksi antara Polres dengan unsur Hexa-helix dalam Pengamanan Pemilu 2024



*Sumber : Bagops Polres Ketapang, 2023*

Berdasarkan data di atas, interaksi antara Polres dengan unsur Hexa-helix pada dasarnya sudah cukup baik khususnya dengan lembaga-lembaga formal. Namun interaksi dengan unsur-unsur lainnya seperti akademisi, dunia usaha, media massa serta Peserta Pemilu termasuk Parpol, Calon dan Masyarakat Pemilih cenderung belum optimal. Pembahasan terkait peran dan interaksi antar unsur Hexa-helix dalam mendukung Pengamanan Pemilu 2024 akan diuraikan sebagai berikut :

### Unsur pemerintah termasuk Pemkab, DPRD, Kodim, Kejaksaan dan Ketua PN.

Unsur Pemerintah memiliki peran sentral dalam pengamanan Pemilu termasuk Pemkab, DPRD, Kodim, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri. Pemkab berperan sebagai penanggung jawab Pemilu di tingkat kabupaten, sementara DPRD mengawasi pelaksanaannya. Kodim membantu pengamanan melalui perbantuan kepada Polres. Kejaksaan bersama Polres melaksanakan penegakan hukum terkait Pemilu sementara dan Pengadilan Negeri menangani sengketa dan gugatan yang terkait dengan hasil Pemilu. Kerjasama di antara unsur pemerintah ini krusial untuk memastikan Pemilu berjalan aman, adil, dan stabil. Namun dalam implementasinya terdapat catatan diantaranya :

1. Adanya potensi penggunaan program kerja dan sumber daya publik untuk keuntungan politik termasuk anggaran dan fasilitas pemerintah, untuk keuntungan politik calon atau partai tertentu.
2. Masih adanya isu netralitas ASN dan konflik kepentingan mengingat Bupati dan anggota DPRD adalah pengurus partai politik tertentu dimana keterlibatan ini dapat mempengaruhi independensi mereka dalam melakukan tugas-tugas yang mendukung proses Pemilu yang adil.

### Unsur Dunia usaha

Dunia usaha dapat berperan sebagai sumber dana atau sponsor untuk mendukung kegiatan pengamanan Pemilu. Namun demikian masih terdapat risiko keterlibatan dunia usaha dalam pengamanan Pemilu diantaranya adalah politisasi dan keterlibatan aktif dari sebagian pengusaha dalam mendukung atau mendanai calon atau partai tertentu dapat mempengaruhi transparansi dan kemandirian Pemilu, serta mengganggu persaingan yang adil di antara calon atau partai.

### Unsur Akademisi

Universitas dan akademisi dapat melakukan riset dan analisis data terkait risiko keamanan. Disamping itu, universitas dan akademisi juga dapat berperan dalam menyebarkan informasi, advokasi dan kampanye sosialisasi anti hoax, polarisasi dan politik identitas misalnya melalui acara Ngobras (ngobrol Bareng Santai) ataupun Podcast Pemilu Aman Demokratis. Adapun catatan terkait peran akademisi dalam pengamanan Pemilu selain minimnya partisipasi, yaitu politisasi dan bias terkait hasil riset, penelitian atau survey yang mempengaruhi kredibilitas dan independensi mereka.

### Unsur Organisasi Non Pemerintah termasuk LSM dan Ormas

LSM Pemantau Pemilu dan Ormas keagamaan dapat berperan sebagai mediator dalam menangani potensi konflik atau perselisihan yang mungkin terjadi selama Pemilu dengan membantu meredakan ketegangan dan mencari solusi damai dalam menangani perbedaan pendapat atau sengketa yang terkait dengan Pemilu serta edukasi kontra hoax. Adapun tantanganya adalah keterbatasan sumber daya, seperti anggaran, personel, dan akses informasi yang memadai yang mempengaruhi kemampuan unsur NGO dalam mendukung pengamanan Pemilu.

### Unsur Media Massa

Media massa berperan dalam menyebarkan informasi terkait pengamanan Pemilu, termasuk informasi mengenai regulasi Pemilu, edukasi kesadaran menjaga kondisi aman dan damai, informasi tata cara pelaporan gangguan keamanan dan pelanggaran Pemilu serta sebagai media informasi terpercaya yang bebas dari hoax. Sedangkan tantangannya adalah

1. Masih ada media yang mengejar rating, perhatian dan popularitas sehingga sering menyajikan berita dengan sensasional yang cenderung tidak substantif, bahkan merupakan pengalihan isu penting.
2. Media juga berpotensi digunakan sebagai alat untuk spin issue dengan memanipulasi opini dan pandangan masyarakat terhadap calon atau isu-isu Pemilu tertentu.
3. Media digital rentan terhadap serangan siber dan tindakan keamanan digital lainnya yang dapat mengganggu proses Pemilu melalui penyebaran berita palsu melalui platform media sosial.

### Unsur aggregator

KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Pemilu secara transparan, adil, dan jujur. Sedangkan Bawaslu berperan melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran dan kecurangan. Adapun tantangannya adalah adanya ketidakmampuan teknis KPUD dalam mengatur, mengorganisir, dan mengawasi Pemilu apalagi Pengurus KPUD baru dilantik tanggal 25 Juni 2023 dan dari lima orang anggota KPU Kabupaten Ketapang hanya 1 orang yang merupakan anggota periode sebelumnya. Tidak jauh berbeda dengan tantangan Bawaslu yang merekrut anggota yang diantaranya belum mempunyai kualifikasi sarjana hukum.

Adapun Parpol dan Calon memiliki peran dalam menciptakan iklim politik yang kondusif dan menjamin kader dan simpatisannya untuk tetap menjunjung tinggi norma keamanan selama Pemilu berlangsung, menghindari retorika provokatif yang dapat memicu ketegangan selama Pemilu. Adapun tantangannya adalah minimnya edukasi politik kepada pendukungnya. Politisasi SARA, mengangkat politik identitas dan isu primordial masih dianggap sebagai sarana paling mudah dan murah untuk menggalang dukungan serta karakter masyarakat yang temperamental serta cenderung menujukkan fanatisme golongan terutama pada masa Pemilu.

## Peran Polres Ketapang dalam Mengkolaborasikan unsur Hexa-helix dalam Pengamanan Pemilu 2024

Untuk menilaiPeran Polres Ketapang dalam Mengkolaborasikan unsur Hexa-helix dalam Pengamanan Pemilu 2024 terlebih dahulu disampaikan mengenai jumlah personel Polres Ketapang dengan spesifikasi pendidikannya sebagai berikut :

Tabel 6. Data Personel



*Sumber: BagSDM Polres Ketapang, 2022.*

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah personel yang berpendidikan sarjana atau magister baru berjumlah 149 orang atau sekitar 27% dari keseluruhan personel. Sedangkan di kalangan PJU dan Pa Polres diketahui dari 71 Pamen dan Pama baru 41 orang yang sudah mengikuti Dikbang baik Sespimmen, STIK, SIP maupun Alih Golongan. Dari keseluruhan personel tersebut, hanya 2/3 dari seluruh personel yang dilibatkan dalam pengamanan Pemilu 2024 mendatang.

Terkait sarana dan prasarana, Polres Ketapang menggunakan sarana prasarana dan peralatan yang telah ada di Polres Ketapang ( alut / alsus ) berupa perlengkapan organik, digunakan sesuai dengan kebutuhan operasi dan hakekat ancaman yang di hadapi. Sedangkan dari aspek anggaran diketahui Polres Ketapang mendapatkan Anggaran sebesar Rp 1.227.895.000,- untuk pengamanan Pileg dan Pilres 2024 sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 7. Data Anggaran Pengamanan Pemilu 2024



*Sumber : Bagops Polres Ketapang, 2023.*

Secara umum, dukungan organisasi Polres Ketapang dalam pengamanan Pemilu sejatinya memang masih terbatas namun jika berkaca pada pelaksanaan Pengamanan Pemilu 2019 yang lalu, melalui manajemen yang baik, bahkan sumber daya organisasi yang terbatas ternyata dapat diberdayakan untuk mencapai tujuan terjaminnya keamanan Pemilu. Dengan anggaran tambahan sebesar Rp 1.227.895.000,- untuk pengamanan Pileg dan Pilres 2024 Polres Ketapang dapat meningkatkan profesionalisme pengamanan. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara kepada para PJU Polres Ketapang didapati sejumlah kendala operasional sebagai berikut :

* 1. Kendala konsolidasi internal
		1. Masih kurangnya intensitas pelatihan dan peningkatan kapasitas sehingga sebagian personel kurang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang cukup untuk menghadapi tantangan dan situasi yang kompleks selama Pemilu.
		2. Sebagian anggota Polres Ketapang merupakan polisi muda yang baru lulus SPN dan ditempatkan dalam fungsi gasum sehingga didapati masih ada gap kompetensi dan pengalaman dalam pengamanan Pemilu. Adanya perbedaan usia anggota yang cukup beragam yang mempengaruhi daya adaptasi terhadap teknologi informasi yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
		3. Polres Ketapang belum memiliki Command Center. Secara umum sebanyak 91,31% sarana prasarana milik Polres Ketapang berada dalam kondisi baik namun ada sejumlah ranmor dan perangkat IT yang rusak mencapai 22,2% dan 15,5%.
	2. Peran sebagai regulator yang diwujudkan dengan menyusun MoU dengan stakeholder yaitu sebanyak 1 MoU dengan unsur Kejaksanaan dalam pembentukan Sentra Gakkumdu serta 2 MoU dengan penyelenggara Pemilu yaitu KPUD dan Bawaslu. Sedangkan catatan terkait peran Polres sebagai regulator diantaranya adalah sebagai berikut :
		1. Kerjasama antara Polres dengan unsur Hexa-helix belum seluruhnya dibingkai dalam kerangka MoU dan dijabarkan dalam SOP kerjasama sehingga pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab (TWT) masih sering diwarnai saling lempar tanggung jawab.
		2. Belum optimalnya kemampuan menjalin kerjasama termasuk keterampilan *legal drafting* sehingga belum maksimal dalam menyusun poin-poin kerjasama dengan unsur Hexa-helix lainnya.
		3. Masih adanya ego sektoral dalam Pengamanan Pemilu karena menganggap bahwa pengamanan Pemilu adalah ranah kewenangan Kepolisian semata.
	3. Peran sebagai fasilitator

Sebagai fasilitator, Polres menjalankan fungsi Preemtif dengan memfasilitasi sejumlah unsur Hexa-helix termasuk media massa, pelibatan TNI dan partisipasi masyarakat untuk mendukung terwujudnya sitkamtibmas yang kondusif selama Pemilu 2024. Namun demikian masih terdapat catatan terkait peran Polres sebagai fasilitator keamanan Pemilu diantaranya adalah sebagai berikut :

* + 1. Kurangnya peran Polres dalam memfasilitasi peserta Pemilu khususnya para calon dan Parpol pendukung dalam memberikan edukasi politik serta masih ada peserta Pemilu yang melakukan politisasi SARA, mengangkat politik identitas dan isu primordial.
		2. Polres kurang berperan dalam memfasilitasi peran Akademisi dan unsur NGO termasuk LSM Pemantau Pemilu serta Ormas dalam mendukung pengamanan Pemilu 2024 untuk mengadvokasi, mengedukasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu.
		3. Polres masih kurang optimal dalam memfasilitasi pembangunan Sistem Informasi Pemilu Terpadu. Sekalipun penyelenggara Pemilu, Pemda dan Polres pada dasarnya sudah memiliki perangkat IT, namun perangkat tersebut belum dilakukan sinkronisasi dan integrasi kepada seluruh unsur Hexa-helix sehingga pertukaran informasi masih dilakukan secara manual.
	1. Peran sebagai Dinamisator

Sebagai dinamisator, Polres berperan menggerakan dan mendorong partisipasi stakeholder dalam pengamanan Pemilu diantaranya dengan pelatihan bersama unsur sentra Gakkumdu bagi penyidik Polres, anggota Bawaslu dan JPU serta Deklarasi Pemilu Damai dan Berintegritas. Adapun kondisi faktual terkait, peran Polres sebagai dinamisator pengamanan Pemilu 2024 adalah sebagai berikut:

* + 1. Polres belum optimal dalam mendorong pertukaran informasi yang efektif dengan unsur Kominda untuk mendeteksi berbagai potensi kerawanan Pemilu.
		2. Polres belum optimal dalam mendorong peran Polsek dan Bhabinkamtibmas dalam pembentukan dan pembinaan jaringan untuk mendukung pulbaket informasi oleh Polsek sebagai basis deteksi dan penanganan potensi gangguan keamanan Pemilu serta dalam mendorong pelaksanaan Polmas Pemilu dan kolaborasi 3 pilar Kamtibmas di tingkat Desa.
		3. Masih kurangnya upaya Polres dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam Pengamanan Pemilu 2024 baik secara konvensional melalui Siskamling, Patroli Bersama dan Giat Sambang maupun secara online dengan melakukan *cyber patrol*, penyebaran infografis Pemilu Aman dan melaporkan berbagai pelanggaran dan tindak pidana Pemilu.

## Upaya Pemecahan Masalah

Upaya pemecahan masalah untuk mengoptimalkan kerjasama hexa-helix dalam mendukung pengamanan Pemilu 2024 memiliki tujuan sebagai berkut:

1. Meningkatkan interaksi antar unsur Hexa-helix yang sinergis dalam mendukung Pengamanan Pemilu 2024.
2. Meningkatkan peran Polres Ketapang yang optimal dalam Pengamanan Pemilu 2024.

Dalam mengimplementasikan upaya pemecahan masalah untuk mengoptimalkan kerjasama hexa-helix dalam mendukung pengamanan Pemilu 2024, mengacu pada regulasi peraturan perundang-undangan dan pedoman lain sebagai berikut:

1. Pancasila dan UUD 1945
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan perubahannya (UU No 7 tahun 2023)
4. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
5. Undang-undang Nomor Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik atau Parpol
6. Perkap No. 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perkap No. 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Polri.
7. Perkap Nomor 12 tahun 2014 tentang Panduan-Penyusunan Kerjasama Polri
8. Program Prioritas Kapolri yaitu Transformasi Menuju Polri yang PRESISI khususnya pada program Transformasi Organisasi dan Transformasi Operasional.
9. Renja Polri 2023

Adapun Implementasi Strategi untuk mengoptimalkan kerjasama hexa-helix dalam mendukung pengamanan Pemilu 2024 adalah sebagai berikut :

### Strategi meningkatkan interaksi antar unsur Hexa-helix yang sinergis dalam mendukung Pengamanan Pemilu 2024.

#### Pemberdayaan dukungan unsur Pemerintah unsur FKPD kepada Polres dalam pengamanan Pemilu 2024

Sasarannya adalah meningkatnya dukungan unsur Pemerintah unsur FKPD kepada Polres dalam pengamanan Pemilu 2024. Program kerja yang dapat dilaksanakan untuk memberdayakan dukungan unsur Pemerintah unsur FKPD kepada Polres dalam pengamanan Pemilu 2024 adalah sebagai beirkut :

1. Melaksanakan pertemuan rutin antara pimpinan Polres Ketapang dengan unsur FKPD Ketapang dan pimpinan daerah lainnya untuk membangun koordinasi yang efektif serta penyamaan persepsi dan pola tindak dalam pengamanan Pemilu 2024 dengan target terselenggaranya pertemuan dan koordinasi unsur FKPD secara rutin minimal sebulan sekali.
2. Memastikan tersedianya dukungan SDM, anggaran dan sarana yang memadai secara kolaboratif untuk mendukung operasional dan kelancaran pengamanan Pemilu dengan target tersedianya SDM, anggaran dan sarpras yang memadai untuk pengamanan Pemilu.

#### Peningkatan sinergisitas kerjasama Polres dengan penyelenggara Pemilu khususnya KPUD dan Bawaslu.

Sasarannya adalah meningkatnya sinergisitas kerjasama Polres dengan penyelenggara Pemilu khususnya KPUD dan Bawaslu. Program kerja yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan sinergisitas kerjasama Polres dengan penyelenggara Pemilu khususnya KPUD dan Bawaslu adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi rutin antara pimpinan Polres, KPUD, dan Bawaslu untuk menjamin seluruh agenda Pemilu dapat terselenggara sesuai jadwal secara aman dengan target terlaksananya seluruh agenda Pemilu dapat terselenggara sesuai jadwal secara aman.
2. Pelatihan bersama unsur sentra Gakkumdu bagi penyidik Polres, anggota Bawaslu dan JPU dengan target terbangunnya kesamaan persepsi dan pola tindak pada tiap anggota sentra Gakkumdu khususnya penyidik Polres, anggota Bawaslu dan Jaksa.

#### Peningkatan peran Akademisi dan unsur NGO dalam mendukung pengamanan Pemilu 2024

Sasarannya adalah meningkatnya peran Akademisi dan unsur NGO dalam mendukung pengamanan Pemilu 2024 melalui kontribusi pemikiran, analisis, dan partisipasi aktif dalam upaya menjaga keamanan. Adapun program kerja yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan peran Akademisi dan unsur NGO dalam mendukung pengamanan Pemilu 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Selip Kamtibmas untuk menjaga keamanan Pemilu dalam setiap materi yang disampaikan oleh akademisi dan unsur NGO termasuk LSM dan Ormas keagamaan termasuk dalam kegiatan-kegiatan keagamaan (pengajian, khotbah dan lain sebagainya) dengan target pesan Kamtibmas diselipkan dalam setiap materi yang disampaikan unsur hexa-helix.
2. Program Ngobras (ngobrol bareng santai) bersama NGO termasuk LSM dan Ormas keagamaan dan unsur Hexa-helix lainnya untuk berbagi pemikiran terkait langkah-langkah strategis dalam mendukung pengamanan Pemilu dengan target terlaksananya kegiatan Ngobras (ngobrol bareng santai) sebulan sekali

#### Penguatan peran media massa dalam menjaga sitkamtibmas yang kondusif selama Pemilu 2024

Sasarannya adalah untuk meningkatnya peran media massa dalam menjaga sitkamtibmas yang kondusif selama Pemilu 2024 dengan memberikan informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab. Program kerja yang dapat dilaksanakan untuk memperkuat peran media massa dalam menjaga sitkamtibmas yang kondusif selama Pemilu 2024 adalah sebagai berikut :

1. Seminar jurnalisme Pemilu bagi jurnalis dan wartawan media massa mengenai etika jurnalistik dan penanganan berita sensitif selama Pemilu dengan target seluruh media mengirimkan utusan untuk mengikuti pelatihan etika jurnalistik Pemilu.
2. Edukasi literasi hukum jurnalistik untuk meningkatkan kesadaran media massa tentang peran dan tanggung jawab media dalam menjaga keamanan Pemilu.
3. Media monitoring untuk memastikan informasi yang disampaikan tidak memicu konflik dan diseminasi berita hoax yang dapat meresahkan masyarakat dengan target untuk menurunkan berita-berita yang bersifat provokatif atau hoax di media massa.

#### Peningkatan peran peserta Pemilu dalam memberikan edukasi politik dan menolak politik identitas

Sasarannya adalah untuk meningkatnya peran peserta Pemilu dalam memberikan edukasi politik dan menolak politik identitas. Adapun program kerja yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan peran peserta Pemilu dalam memberikan edukasi politik dan menolak politik identitas adalah sebagai berikut :

1. Pelatihan kepemimpinan dan etika politik bagi calon dan kader Parpol tentang etika politik Pancasila dengan indikator 50% calon dan kader Parpol mengikuti pelatihan kepemimpinan dan etika politik.
2. Kerjasama edukasi politik yang berfokus pada pentingnya kontestasi Pemilu yang sehat dan adil, serta bahaya politik identitas bagi persatuan dan keutuhan bangsa dengan target minimnya insiden politisasi SARA dan isu primordial dalam kontestasi Pemilu.
3. Menyelenggarakna podcast Pemilu secara terpadu dengan unsur Hexa-helix untuk membangun pemahaman tentang pentingnya Pemilu yang aman, adil dan demokratis dengan target terlaksananya podcast Pemilu secara terpadu dengan unsur Hexa-helix setiap bulan.

### Strategi meningkatkan peran Polres Ketapang yang optimal dalam Pengamanan Pemilu 2024.

Strategi internal untuk meningkatkan peran Polres Ketapang yang optimal dalam Pengamanan Pemilu 2024 adalah sebagai berikut :

#### Analisa dan evaluasi hasil pengamanan Pemilu di masa lalu yang aman dan kondusif secara kolaboratif

Sasarannya adalah untuk menyusun strategi pengamanan pada Pemilu 2024 berdasarkan analisis hasil pengamanan Pemilu sebelumnya. Program kerja yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan analisa dan evaluasi hasil pengamanan Pemilu di masa lalu yang aman dan kondusif secara kolaboratif adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan tim analisis yang terdiri dari perwakilan dari Polres, KPU, Bawaslu, akademisi, media dan Data Analyst profesional dengan indikator terbentuknya tim analisis dengan representasi lengkap dari berbagai instansi terkait.
2. Pengumpulan data dan informasi keberhasilan, tantangan, dan kegagalan yang dihadapi selama proses Pemilu dengan target terkumpulnya data dan informasi lengkap untuk keperluan analisis.
3. Perumusan rencana tindak lanjut dan pengembangan strategi dan taktik yang lebih efektif dalam menghadapi situasi Pemilu 2024 dengan target tersusunnya strategi pengamanan Pemilu 2024 yang lebih efektif dan adaptif.

#### Pembinaan kompetensi personel dalam melaksanakan Pengamanan Pemilu 2024

Sasarannya adalah untuk meningkatnya kompetensi personel Polres Ketapang dalam melaksanakan Pengamanan Pemilu 2024 secara profesional dan efektif. Beberapa program kerja yang dapat dilaksanakan untuk membina kompetensi personel dalam melaksanakan Pengamanan Pemilu 2024 diantaranya adalah :

1. Pelatihan khusus bagi personel Polres Ketapang tentang teknik dan taktik pengamanan Pemilu, termasuk penanganan situasi kontinjensi dan potensi konflik dengan indikator terlaksananya pelatihan khusus pengamanan Pemilu bagi seluruh personel yang dilibatkan dalam pengamanan pemilu.
2. Simulasi pengamanan Pemilu secara berkala, guna meningkatkan kesiapan dan responsivitas personel dalam menghadapi dinamika situasional dengan indikator terwujudnya kesiapan dan kecepatan respon personel menghadapi dinamika di lapangan.

#### Peningkatan peran Polsek dan Bhabinkamtibmas dalam mendukung kerjasama pengamanan Pemilu 2024.

Sasarannya adalah untuk meningkatnya peran Polsek dan Bhabinkamtibmas dalam mensinergikan dukungan pengamanan Pemilu 2024. Program kerja yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan peran Polsek dan Bhabinkamtibmas dalam mendukung kerjasama pengamanan Pemilu 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan dan pembinaan jaringan untuk mendukung pulbaket informasi oleh Polsek sebagai basis deteksi dan penanganan potensi gangguan keamanan Pemilu terdepan dengan indikator Terbentuk dan terbinanya jaringan informasi serta pertambahan kontak person oleh Polsek dan Bhabinkamtibmas.
2. Penguatan Polmas Pemilu dengan melibatkan peran aktif dari masyarakat, termasuk tokoh masyarakat dan pemuda, dalam mendukung kegiatan pengamanan Pemilu dengan indikator meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pengamanan Pemilu.
3. Pembinaan kolaborasi 3 pilar Kamtibmas di tingkat Desa dalam pengamanan Pemilu dengan indikator terlaksananya kegiatan pengamanan Pemilu 2024 di tingkat desa oleh Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Kepala Desa.

#### Pemberdayaan teknologi informasi dalam mendukung pengamanan Pemilu 2024 oleh Polres Ketapang.

Sasarannya adalah meningkatnya dukungan teknologi informasi dalam pengamanan Pemilu 2024 untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsifitas pengamanan Pemilu. Adapun program kerja yang dapat dilaksanakan untuk memberdayakan teknologi informasi dalam mendukung pengamanan Pemilu 2024 oleh Polres Ketapang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Sistem Informasi Pemilu Terintegrasi sebagai media pengumpulan, analisis, dan pelaporan data terkait Pemilu dengan target terbangunnya Sistem Informasi Pemilu terintegrasi di Polres Ketapang.
2. Penggunaan teknologi analisis data big data, kecerdasan buatan (AI), integrasi API/ Application Programming Interface Google Map untuk memonitor dan menganalisis situasi kamtibmas secara real-time dengan target meningkatnya pemanfaatan teknologi big data dan kecerdasan buatan dalam pengawasan keamanan Pemilu.
3. Kerjasama dengan dengan vendor teknologi terkait dan prodi Teknik Informatika untuk memastikan teknologi tepat guna dalam pengamanan Pemilu dengan target terjalinnya kerjasama yang efektif dengan instansi teknologi terkait.

#### Penjabaran MoU dalam SOP kerjasama berdasarkan Perkap Panduan Kerjasama Polri untuk memperjelas pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab (TWT) masing-masing unsur Hexa-helix.

Sasarannya adalah meningkatnya kejelasan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab (TWT) masing-masing unsur Hexa-helix. Program kerja yang dapat dilaksanakan untuk memperjelas pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab (TWT) masing-masing unsur Hexa-helix adalah sebagai berikut :

1. Konsultasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah, akademisi, industri, masyarakat, dan media, untuk menyusun MoU yang mencerminkan kepentingan dari setiap unsur Hexa-helix dengan target terselesaikannya MoU sesuai Perkap Panduan Kerjasama Polri.
2. Penyusunan SOP kerjasama berdasarkan MoU yang telah disepakati, yang memuat rincian tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing unsur Hexa-helix dengan target tersusunnya SOP kerjasama yang jelas dan terstruktur sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas, wewenang dan tanggung jawab.
3. Diseminasi, sosialisasi dan audit kepatuhan terkait implementasi SOP kerjasama dengan tagret terlaksananya kerjasama yang terkoordinasi dengan baik sesuai dengan SOP yang telah disusun.

# Simpulan

Interaksi antar unsur Hexa-helix dalam mendukung Pengamanan Pemilu 2024 pada dasarnya sudah berjalan baik dengan unsur pemerintah, Dunia usaha, Akademisi, Organisasi Non Pemerintah, Media Massa maupun aggregator termasuk Penyelenggara dan Peserta Pemilu dengan isu utama yaitu konflik kepentingan, minimnya partisipasi, politik identitas dan karakter masyarakat. Upaya pemcahan masalahnya diantaranya melalui penguatan peran media massa, peserta Pemilu, Akademisi dan unsur NGO, dukungan unsur Pemerintah serta penyelenggara Pemilu khususnya KPUD dan Panwaslu.

Peran Polres Ketapang dalam pengamanan Pemilu 2024 sudah cukup baik dan sesuai tupoksinya serta belum ditemukan adanya laporan isu netralitas maupun kurang profesional. Namun demikian masih terdapat sejumlah catatan terkait peran Polres sebagai regulator, fasilitator dan dinamisator kerjasama Hexa-helix diantaranya yaitu kerjasama belum dibingkai dalam MoU akibat keterbatasan keterampilan legal drafting, belum optimal dalam memfasilitasi peserta Pemilu, Akademisi dan unsur NGO dan pembangunan Sistem Informasi Pemilu Terpadu, pertukaran informasi, pembentukan dan pembinaan jaringan serta partisipasi masyarakat. Dengan demikian perlu dioptimalkan melalui Anev hasil pengamanan Pemilu, pemberdayaan teknologi informasi serta menjabarkan MoU dalam SOP kerjasama untuk memperjelas pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab (TWT) masing-masing unsur Hexa-helix.

Beberapa rekomendasi yang dapat penulis sampaikan untuk meningkatkan kolaborasi hexa-helix guna mendukung pengamanan Pemilu 2024 diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Merekomendasikan kepada Kapolda Up Karoops untuk menyegerakan pelatihan 13 kompetensi prioritas terkait dengan Pengamanan Pemilu yaitu : Pelatihan penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*); Diskresi Kepolisian; Penanganan Konflik Sosial; PAM Pemilu; menembak; beladiri Polri; Polsek sebagai deteksi dini; penanganan radikalisme; PHH; Pengamanan VIP/VVIP; Jibom; Sistem Peradilan Penanganan Anak Serta Pengemudi VIP/VVIP

2. Merekomendasikan kepada Kapolda up. Karoops untuk mengembangkan Sistem Informasi Pemilu Terintegrasi sebagai media pengumpulan, analisis, dan pelaporan data terkait Pemilu yang didukung dengan teknologi analisis data big data, kecerdasan buatan (AI), integrasi API/ *Application Programming Interface* Google Map sehingga dapat memonitor dan menganalisis situasi kamtibmas secara real-time melalui pop-up notification.

3. Merekomendasikan kepada Kapolda up Karo Ops untuk menyelenggarakan Podcast Pemilu Aman Damai dan Demokratis, Program Ngobras dan Selip Kamtibmas di tingkat Polda dengan melbatkan seluruh unsur Hexa-helix sebagai nara sumber.

# Daftar Pustaka

Ansell, C., & Gash, A. 2008. *Collaborative Governance in Theory and Practice*. Journal of Public Administration Research and Theory , 543-571.

Camarihna-Matos, L.M. & Hamideh Afsarmanesh. 2008. *Concept of Collaboration*. USA: IGI Global.

Chryshnanda DL. 2023. Jejak Dialog Peradaban. Bandung : Penerbit Sespim Polri

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. 2012. *An Integrative Framework For Collaborative Governance*. Journal of Public Administration Research and Theory , 1-29.

Lindmark, A.; Sturesson. E.; and Nilsson R. M. 2009. *Collaboration for Innovation - A Study in the Öresund Region.* Sweden: Lund University Libraries.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. (Terjemahan. Jakarta: UI Press)

Moghaddam, Golnessa Galyani & Moballeghi, Mostafa. 2007. *The Importance of Aggregators for Libraries in the Digital Era.* Diakses tanggal 4 Oktober 2023 dari http://eprints.rclis.org/11331/1/The\_Importance\_of\_Aggregators\_for\_Libraries\_in\_the\_Digital%E2%80%A6.pdf

Pahlevi, A. S. 2017. Gagasan tentang pengembangan ekonomi kreatif nasional (studi pada potensi, peluang, dan tantangan ekonomi kreatif di kota Malang). Seminar Nasional Seni dan Desain, hlm 185-188.

Rangkuti, Freddy. 2013. Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT Cara. Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI. Penerbit PT. Gramedia Pustaka

Satari, F., Larasati, T., Putri, S. S., Shintia, I., Pempasa, I., Oktaviani, Y., Ramadhan, P., & Herawan, R. (2017). Indonesia Kreatif Animasi. In Bekraf. Badan Ekonomi Kreatif Indonesia.

Satria, Haris. 2022. Pengembangan Kota Kreatif Berbasis Lingkungan Berkelanjutan. Jakarta : Jejak Pustaka.

.